

Judul : Pondok Pesantren Diminta Lakukan Evaluasi
Tanggal : Senin, 12 September 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 16

Pondok Pesantren Diminta Lakukan Evaluasi

Para orang tua diimbau tidak takut memasukkan anaknya belajar ke ponpes.

■ FUJI E PERMANA,
UMAR MUKHTAR

JAKARTA — Wakil Menteri Agama (Wamenag) KH Zainut Tauhid Sa'adi menyatakan prihatin atas dugaan terjadinya tindak kekerasan yang menyebabkan wafatnya santri bernama AM di Pondok Pesantren (Ponpes) Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Wamenag pun mengimbau, Ponpes Gontor dan ponpes lainnya melakukan evaluasi serta perbaikan.

"Saya ikut menyampaikan belasungkawa atas wafatnya AM, santri Ponpes Gontor, korban dari aksi kekerasan seniornya. Saya berharap hal ini tidak terulang kembali di kemudian hari," kata Wamenag kepada *Republika*, Ahad (11/9).

Ia mengatakan, menteri agama sudah meminta kepada kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Ponorogo untuk melakukan pengecekan awal di TKP dan membentuk tim investigasi. Tim investigasi akan melakukan koordinasi dengan KPAI, kepolisian setempat, dan berbagai pihak yang terkait untuk mendapatkan keterangan secara lengkap serta kom-

prehensif untuk bahan evaluasi dan mengambil kebijakan.

"Semoga dengan adanya kejadian ini, Ponpes Gontor dan juga pondok pesantren lainnya melakukan evaluasi dan perbaikan dari berbagai kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan lainnya yang berpotensi melahirkan tindakan kekerasan," ujar Wamenag.

Wamenag meyakini, apa yang terjadi di Ponpes Gontor merupakan bentuk kelalaian dan tindakan pribadi dari oknum santri yang bertindak berlebihan serta melampaui batas kewajaran. Bukan bagian dari kebijakan umum di Ponpes Gontor.

"Untuk hal tersebut, saya mengimbau kepada para wali santri untuk tetap tenang dan memberikan kepercayaan penuh kepada pengasuh Ponpes Gontor. Percayalah bahwa pesantren adalah tempat yang aman bagi anak-anak belajar," ujar Wamenag yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kepala Subdit Pendidikan Ponpes Kemenag, Basnang Said, juga mengimbau masyarakat agar tidak khawatir memasukkan putra dan putrinya ke lembaga pendidikan terbaik di

Tanah Air yakni pesantren. Kejadian yang tidak diinginkan di pesantren hanya terjadi di segelintir pesantren dan bersifat kasuistik saja. Masih banyak pesantren yang memiliki komitmen tinggi membina santri dan santriwati untuk menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara.

"Pesantren ratusan tahun lalu sampai hari ini telah terbukti nyata menjadi lembaga terdepan dalam memperbaiki akhlak generasi bangsa," ujar Basnang.

Sebelumnya, imbauan serupa juga disampaikan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis. Ia menyebut, kejadian itu berada di luar kehendak manusia dan kontrol pesantren. "Mungkin dari sekian ribu bahkan kalau Gontor sekian juta (santri), inilah mungkin peristiwa yang tidak diinginkan," katanya melalui laman resmi MUI.

Karena itu, Kiai Cholil menegaskan, kepada orang tua untuk tidak perlu takut memasukkan anaknya ke ponpes. Ia juga meminta setiap ponpes untuk meningkatkan pengawasan dan kontrol pada setiap santri.

Sementara, anggota Komisi VIII DPR, Iskan Qolba Lubis, meminta Kemenag membuat prosedur operasional standar (POS) yang merinci berbagai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di lingkungan pesantren

termasuk juga asrama. Menurut dia, POS ini perlu diterapkan di seluruh pesantren supaya kejadian serupa tidak terulang kembali.

Adapun beberapa hal yang perlu diatur di dalam POS itu di antaranya meliputi kapasitas asrama yang tidak boleh terlalu padat, ketersediaan fasilitas olahraga, larangan santri keluar-masuk rumah kiai agar tidak terjadi fitnah, dan batasan hubungan antara pembimbing maupun guru dengan santrinya.

"Jadi, harus ada fasilitas yang membuat mereka nyaman seperti fasilitas olahraga dan lainnya. Itu semua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya kepada *Republika*.

Iskan juga menekankan, Kemenag harus melakukan langkah-langkah yang sifatnya antisipatif. "Jangan sampai seperti pemadam kebakaran. Begitu ada kejadian, baru ada tindakan, tetapi tidak ada antisipasi. Maka, harus dibuat sistem melalui SOP tadi sebagai bentuk supervisi kepada pesantren," katanya.

Pesantren, menurut Iskan, memang merupakan lembaga otonomi sehingga dapat membuat aturan khusus di lingkungannya. Namun, dia mengatakan, negara tetap harus hadir, terutama dalam membuat perlindungan supaya terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan. ■ *ed: wachidah handasah*